

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN*FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SOUTH SORONG REGENCY GOVERNMENT*

Oleh:

Anastasia Ivana Ngangi¹**Sri Murni²****Victoria N Untu³**

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi

Email:

[¹Anastasiaivana73@yahoo.com](mailto:Anastasiaivana73@yahoo.com)[²Srimurnirustandi@yahoo.co.id](mailto:Srimurnirustandi@yahoo.co.id)[³Victorianeisyeuntu@yahoo.com](mailto:Victorianeisyeuntu@yahoo.com)

Abstrak: Kabupaten Sorong Selatan adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat dengan luas wilayah 7,789,92 km² dengan jumlah penduduk berkisar 43.036 jiwa dan mulai dimekarkan pada tahun 2002. Tahun 2016, Kabupaten ini mengalami pemekaran daerah/wilayah menjadi 15 distrik, 123 kampung dan 2 kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja keuangan serta menganalisis laporan keuangan periode tahun 2012-2016. Metode analisis yang digunakan adalah Kuantitatif, dengan menggunakan Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang dilihat dari Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan, dikatakan baik dan efisien. Sedangkan jika dilihat dari Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian dan Rasio Keserasian Belanja Modal masih sangat kurang. Disebabkan karena pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dan juga penggalian potensi serta pengelolaan sumber daya alam masih sangat kurang dan disertai dengan porsi belanja daerah yang sebagian dananya dialokasikan untuk belanja modal yang dinilai kurang serasi.

Kata Kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio keuangan.

Abstract: South Sorong Regency is a Regency located in West Papua Province with an area of 7,789.92 km² with a population of around 43,036 people and began to be expanded in 2002. In 2016, the Regency experienced the expansion of regions / regions into 15 districts, 123 villages and 2 kelurahan. This study aims to determine the improvement of financial performance and analyze financial statements for the period 2012-2016. The analytical method used is Quantitative, using the Ratio of Regional Revenues and Expenditures, namely the Independence Ratio, Efficiency Ratio, Decentralization Ratio, Growth Ratio and Capital Expenditure Harmony Ratio. The results of this study indicate that the Financial Ratios of the South Sorong Regency Government seen from the Efficiency Ratio and Growth Ratio are said to be good and efficient. Whereas if seen from the Decentralization Ratio, the Independence Ratio and the Capital Adequacy Ratio are still very lacking. This is because local governments are still dependent on the central government and also extracting potential and management of natural resources is still very lacking and is accompanied by a portion of regional expenditures, some of which are allocated for capital expenditures which are considered less harmonious.

Keywords: local government financial performance, regional financial ratios.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan mendasar sejak ditetapkannya Otonomi daerah pada tahun 2001. UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah yang memberikan peluang besar bagi masyarakat Papua dalam menggali potensi yang dimiliki. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan mempertahankan atas keadilan dan kepatuhan.

Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat terbentuk dalam dasar hukum UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Sorong Selatan dan mulai diresmikan pada tanggal 12 April 2003 yang ber Ibu Kota Teminabuan dengan luas wilayah mencapai 7,789,92km² dan memiliki 15 distrik yang meliputi 123 kampung dan 2 kelurahan. Kabupaten ini mempunyai julukan Kabupten 1001 Sungai.

Maksud penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sorong Selatan sebab peneliti merupakan penduduk kabupaten tersebut dan penasaran dengan pengelolaan keuangan serta perkembangan pemerintah dakam mengembangkan kabupaten ini dan juga untuk mengetahui apakah daerah ini masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Karena yang kita ketahui bersama rendahnya PAD bukan disebabkan karena daerah itu miskin, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil sumber daya dan potensi daerah tersebut. Sehingga penulis mengambil data Laporan Realisasi Anggaran sesudah dimekarkannya Kabupaten Sorong Selatan selama periode tahun 2012 sampai tahun 2016 pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan cara menganalisis laporan keuangannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui kinerja keuangan yang dilihat dari aspek belanja dan pendapatan serta menganalisis laporan keuangan periode tahun 2012 sampai 2016 di Kabupaten Sorong Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Mahmudi (2016:1) Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Laporan keuangan publikasian tidak lebih seperti berita atau informasi di media massa, sehingga membaca laporan keuangan pada dasarnya tidaklah lebih sulit dibandingkan membaca berita atau tabloid. Lanjut Mahmudi (2016:5) Menurut SAP dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mahmudi (2016:89) Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu di analisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Harmanto (1991:161) Ratio adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan atau korelasi antara suatu jumlah dengan jumlah tertentu lainnya. Analisis ratio merupakan suatu teknik analisa yang dalam banyak

hal mampu memberikan petunjuk atau indikator dan gejala-gejala yang timbul disekitar kondisi yang melingkupinya. Apabila ratio-ratio ini dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan mampu menunjukkan pada aspek-aspek mana evaluasi dan analisa lebih lanjut harus dilakukan.

Analisis Pendapatan

Mahmudi (2016:134) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012:277) semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	RKKD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00% - 25,00%	Intruktif
Rendah	25,01% - 50,00%	Konsultatif
Sedang	50,01% - 75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01% - 100%	Delegatif

Sumber: Oktavianus, Sri Murni dan Saerang (2015)

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi penerimaan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efisien : <10%
- Efisien : 10% - 20%
- Cukup efisien : 21% - 30%
- Kurang efisien : 31% - 40%
- Tidak efisien : >40%

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2016:140) Rasio Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Presentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Oktavianus, Sri Murni dan Saerang (2015)

Analisis Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi equitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan pernah diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016:153) belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Oktavianus, Sri Murni dan Saerang (2015) dalam rasio ini akan dilihat empat pertumbuhan komponen APBD, yaitu: PAD, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan. Lanjut Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013) rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Rasio Kerasian Belanja Modal

Menurut Mahmudi (2016:162) pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dilakukan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja modal thd total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Wonda (2016) dalam studinya Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio efektifitas baik.

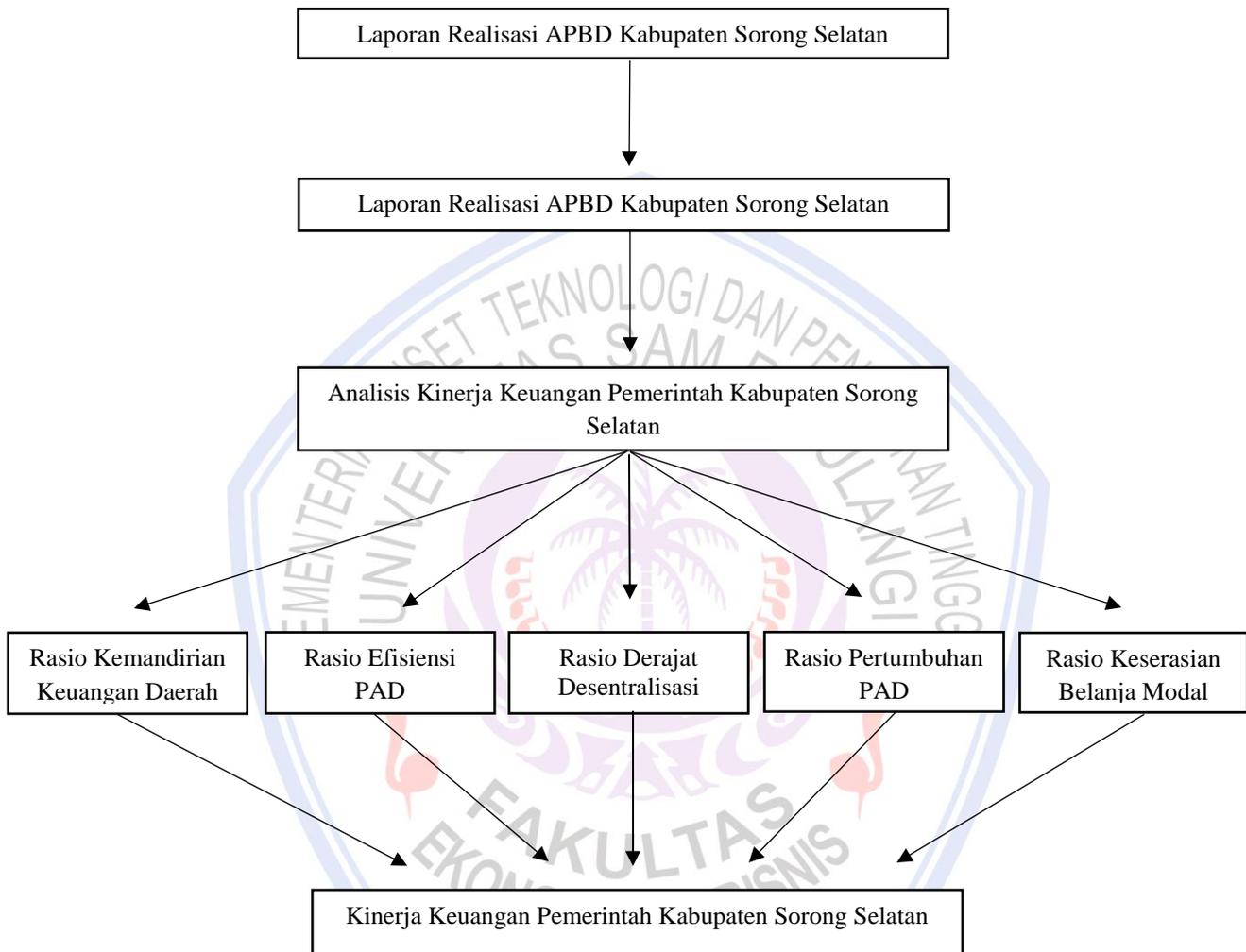
Ramadani (2016) dalam studinya Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PAD kota Samarinda secara umum dikatakan cukup baik.

Kusumadewi dan Ilat (2016) dalam studinya Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola daerah mampu merealisasikan pendapatnya melebihi dari yang telah dianggarkan. Pemerintah harus dapat berusaha untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahnya dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan cara menggali potensi baru, dan perlu adanya mengoptimalkan kinerja belanjanya untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigrasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat yang akan memberikan manfaat jangka panjang.

Poyoh, Sri Murni dan Tulung (2017) dalam studinya Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja badan keuangan daerah kota Tomohon dalam mengelola pendapatannya dikatakan belum baik hal ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan BKD belum mampu merealisasikan pendapatannya lebih dari yang dianggarkan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : Kajian Empirik

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:11) bahwa metode kuantitatif disebut juga metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Menurut Marsono (2016:2) dikatakan bahwa pendekatan kuantitatif dilakukan dari penelitian eksperimen (dilapangan atau dilaboratorium) dan penelitian *expost-facto* (mempelajari fakta yang sudah ada/terjadi dengan menggunakan eksperimen).

Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer berupa dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang diperoleh dari Kantor BPKAD Kabupaten Sorong Selatan dan Data Sekunder berupa gambaran umum Kabupaten Sorong Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan pencarian data sekunder dan data primer dengan pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada Pemerintah Daerah atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode Dokumentasi ini melakukan pencarian data dari BPS Kabupaten Sorong Selatan berupa data umum dan pengumpulan data dari Kantor BPKAD berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa data khusus.

Teknik Analisis.

Teknik Analisis

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Penggunaan teknik analisis data secara deskriptif untuk memperoleh gambaran dari rasio keuangan yang di analisis seperti rasio kemandirian, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, dan rasio keserasian belanja modal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 3. Rekapitan Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

Rasio	2012	2013	2014	2015	2015	Rata-rata
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	2,32	2,5	4,02	2,26	3,66	3,02%
Rasio Efisiensi PAD	11,24	10	4,9	12,4	5,51	8,81%
Rasio Derajat Desentralisasi	2,26	2,42	3,9	2,45	3,32	2,85%
Rasio Pertumbuhan PAD	31,6	18,7	77,16	26,52	45,45	40%
Rasio Keserasian Belanja Modal Daerah	37,6	33,1	37,7	32,51	30	34,2%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PAD dan Belanja Daerah (Data diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 2. Rekapitan Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja Modal Daerah dapat dinyatakan terdapat perbedaan akan tetapi tidak signifikan dikarenakan nilai tiap rasio mengalami perubahan yang fluktuatif setiap periode.

Pembahasan

Rasio Kemandirian

Berdasarkan Tabel 2 Rasio Kemandirian, Milliar (ribu rupiah) dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sorong Selatan tergolong sangat rendah sekali, hal ini ditunjukkan dari rata-rata rasio kemandirian kurang dari 25%. Dengan demikian pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk hubungan intruktif yang berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemekaran.

Dalam penelitian Ramadani (2016) Rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah kota Samarinda dari tahun 2010-2014 masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih belum maksimal. Dikarenakan masih relatif kurangnya PAD yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten kota Samarinda. Berbeda dengan penelitian Mengkuningtyas (2015) dalam penelitian Rasio pertumbuhan kabupaten Tangerang mengalami peningkatan baik sebelum dan sesudah dimekarkan. Kabupaten ini mengalami peningkatan rata-rata rasio kemandirian menjadi 32,23% (semula 17,73%) sehingga membentuk hubungan konsultatif yang berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 2 atau dibawah 20% atau bisa juga dikatakan angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100%. Dari hasil tersebut dinilai bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sorong Selatan ini termasuk dalam kategori efisien. Yang berarti realisasi anggaran belanja pemerintah ini tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja.

Dalam penelitian Mustafa (2008) dalam study Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimana nilai rasio berkisar antara 11,48% sampai 99,98% dengan rata-rata sebesar 65,65% yang berarti efisien. Ini menunjukkan bahwa Dispenda Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam tahun anggaran 2007 secara efisien. Namun berbeda dengan penelitian Paat (2013) dalam study perbandingan kinerja pengelolaan APBD antara pemerintah kota Tomohon dengan pemerintah kota Manado dimana nilai rasio untuk kota Manado untuk tahun 2010 adalah 102,11% dan tahun 2011 adalah 97,49% dengan rata-rata 99,80% yang berarti kota Manado kurang efisien dalam mengelola keuangan daerahnya.

Rasio Derajat Desentralisasi

Berdasarkan Tabel 2 Kabupaten Sorong Selatan selang periode tahun 2012-2016 dilihat dari rasio Desentralisasi menunjukkan sangat kurang. Hal ini berarti kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki masih sangat rendah dan mengalami perubahan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Sehingga dapat diklarifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal adalah sangat kurang.

Dalam penelitian Tambuwun dan Kawan-kawan (2014) dalam study Analisis kinerja keuangan pemerintah kota Manado dimana rasio desentralisasi dari tahun 2011-2013 dengan jumlah rata-rata 16,69% yang berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan kota Manado masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berbeda dalam penelitian Mustafa (2008) dalam study Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimana perkembangan derajat desentralisasi fiskal dalam kurun waktu 5 tahun (2003-2007) berfluktuasi, namun relative stabil. Secara rata-rata, derajat desentralisasi fiskal Kalimantan barat sebesar 40,10% pertahun dan masuk dalam kategori baik. Artinya, PAD memberikan kontribusi yang relative besar terhadap PAD sehingga semakin meningkatkan kemampuan keuangan provinsi Kalimantan barat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah serta mengindikasikan tingkat ketergantungan yang rendah pada transfer pemerintah pusat.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 2 Kabupaten Sorong Selatan mengalami pertumbuhan yang positif dimana rata-rata pertumbuhan yang positif itu adalah 40%. Namun dalam 5 tahun anggaran kabupaten ini mengalami perubahan yang fluktuatif. Namun dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan masih mampu dalam mempertahankan peningkatan perekonomiannya.

Dilihat dari penelitian Ramadani (2016) dalam studi Analisis kinerja anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Samarinda dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah pemkot Samarinda tahun 2010-2014 secara umum mengalami fluktuasi (naik-turun) kinerja keuangan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif meningkat yaitu 16,75%. Sedangkan menurut penelitian Oktavianus, Murni dan Saerang (2015) Analisis pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bitung dan kota Tomohon menunjuka rata-rata pertumbuhan negative, karena pertumbuhan PAD dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, melainkan diikuti belanja rutin.

Rasio Efisiensi Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan pada belanja modal maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar, begitu pula sebaliknya. Dan dapat dilihat bahwa porsi belanja daerah sebagian dana dialokasikan untuk belanja modal, dan termasuk dalam kategori kurang serasi.

Dalam penelitian Karlina (2017) Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD kota Surabaya tahun 2012-2015 rasio belanja modal masuk dalam kategori kurang serasi, dimana rata-ratanya adalah 24,98% dimana dari tahun 2012-2015 pemerintah kota Surabaya mengalokasikan sebagian anggaran belanjanya untuk belanja modal yaitu rata-rata 24,98%. Berbeda dengan penelitian Ramadani (2016) Rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah kota Samarinda dari tahun 2010-2014, kinerja keuangan belanja daerah kota Samarinda tahun 2010-2014 dilihat dari keserasian belanja daerah, secara umum dapat dikatakan sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata sebesar 33,79% untuk rasio belanja modal terhadap total belanja. Rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi terjadi tahun 2013, dan rasio belanja terendah terjadi tahun 2011

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya secara keseluruhan selang periode tahun anggaran 2012-2016 Kabupaten Sorong Selatan mengalami perkembangan yang baik. Hal ini ditunjukkan melalui perhitungan rasio-rasio berikut ini:

1. Dapat dilihat dari Rasio Kemandirian dengan angka rata-rata 3,02%, yang berarti peranan pemerintah pusat masih menjadi dominan dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih bergantung pada pihak eksternal.
2. Dilihat dari Rasio Efisiensi PAD menunjukkan pada tahun anggaran 2012 (11,24%) sampai tahun 2016 (5,51%) dengan rata-rata 8,81%. Dalam hal ini kinerja pemerintah dikatakan efisien karena rasio yang dicapai kurang dari 20% dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan termasuk dalam kriteria Efisien yang berarti Kabupaten ini efisien dalam mengelola keuangan daerahnya karena kecilnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih kecil dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.
3. Rasio derajat desentralisasi ini masih sangat kurang. Dimana rata-rata untuk rasio ini adalah 2,85% yang berarti kewenangan dan tanggungjawab yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki masih sangat rendah dan mengalami perubahan angka yang fluktuatif setiap tahunnya.
4. Dilihat dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ini mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada saat itu telah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan perekonomiannya dari tahun ke tahun.
5. Untuk Rasio Belanja Modal Daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang fluktuatif maka dapat dikatakan bahwa porsi belanja daerah untuk investasi cukup besar pada Kabupaten Sorong Selatan dan porsi belanja daerah sebagian dana dialokasikan untuk belanja modal, dan masuk dalam kategori kurang serasi.

Saran

1. **Bagi Pemerintah**, Mengingat Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap roda perekonomian pemerintah, daerah Kabupaten Sorong Selatan diharapkan untuk dapat mempertahankan pengelolaan keuangan daerah sendiri secara baik dan teliti bahkan meningkatkan perekonomian daerahnya dari periode ke periode selanjutnya. Dan menggali lagi potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk menjadi suatu keunggulan daerah.
2. **Bagi Penulis Selanjutnya**, Bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di Kabupaten Sorong Selatan diharapkan untuk menambah periode penelitian dan metode penelitian sebagai alat pengukurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijayanti,R., dan Ruserlistyanti. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.12 No.1 <https://media.neliti.com/media/publications/5139-ID-analisis-perbandingan-kinerja-keuangan-pemerintah-propinsi-seindonesia.pdf>, diakses pada tanggal 22 februari 2018.
- Harmanto. 1991. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Halim,A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Kementrian Dalam Negeri 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Kementrian Dalam Negeri 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Kusumadewi,W.N., dan Ilat,V. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11766/11359>, diakses pada tanggal 9 maret 2018.
- Karlina,A. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.6 No.3 Maret 2017 ISSN: 2460-0585. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/download/2867/2473>, diakses pada tanggal 9 maret 2018.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Jilid I. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Marsono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif: Langkah-Langkah Menyusun Skripsi, Tesis atau Disertai Menggunakan Teknik Analisis Jalur*. Penerbit In Media, Bogor.
- Mengkuningtyas,Y. 2015. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia sebelum dan setelah pemekaran. *Jurnal Nasional*. <https://download.portalgaruda.org/article.php?article=404948&val=6467&title=analisis%20perbandingan%20kinerja%20keuangan%20pemerintah%20daerah%20kota/kabupaten%20di%20indonesia%20sebelum%20dan%20setelah%20pemekaran>, diakses pada tanggal 28 oktober 2018.
- Mustafa,B. 2008. Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Terakreditasi SK Dirjen Dikti* No.43/Dikti/Kep/2008 ISSN: 1693-5241. <http://www.jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/110/101>, diakses pada tanggal 1 maret 2018.
- Oktavianus,D., Sri Murni., dan Saerang,I.S. 2015. Analisis perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah pada Kota Bitung dan Kota Tomohon periode anggaran 2010-2014. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.3 September 2015, Hal.927-938 ISSN: 2303-11. <https://media.neliti.com/media/publications/2755-ID-analisis-perbandingan-kemampuan-keuangan-daerah-pada-kota-bitung-dan-kota-tomoho.pdf>, diakses pada tanggal 27 oktober 2018.

- Paat,S. 2013. Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 September 2013, Hal.851-862 ISSN: 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/110/101>, diakses pada tanggal 3 maret 2018.
- Pemerintah Republik Indonesia 2004 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2004 Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2005 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2000 Undang-Undang No.105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia 2002 Undang-Undang No.26 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Bigoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama, Jakarta
- Poyoh,C.M., Sri Murni., dan Tulung,J.E. 2015. Analisis Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal.745-752 ISSN 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/15958/15474>, diakses pada tanggal 27 oktober 2018.
- Ramadani,R.F. 2016. Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi* Vol.5 No.3 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/56181-ID-Analisis-kinerja-anggaran-dan-realisisi.pdf>, diakses pada tanggal 27 oktober 2018.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Edisi Kedua. Alfabeta, Bandung.
- Tambuwun,E., Pangemanan,S.S., dan Afandi,D. 2014 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal 81-89 ISSN: 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/6620/5746>, diakses pada tanggal 1 maret 2018.
- Wonda,W. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.3 September 2016, Hal.192-200 ISSN: 2303-1174, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/index.php/emba/article/download/13668/13252>, diakses pada tanggal 28 februari 2018.